



AUDIENSI - Suasana audiensi PJKIP Sumbar dengan Ketua DPRD Supardi dan lainnya, Senin (8/1) di gedung DPRD setempat, terkait belum diumumkan hasil seleksi calon komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat. (ist)

DARI AUDIENSI PJKIP-DPRD SUMBAR

Penetapan Hasil Seleksi KI Sumbar Masih Menunggu Surat dari Pusat

PADANG - SINGGALANG

DPRD Sumbar berjanji segera mengumumkan hasil seleksi calon komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat, jika telah menerima surat balasan dari KI pusat. Namun karena surat balasan tersebut belum kunjung diterima, maka proses penetapan dari pimpinan DPRD terpaksa tertunda pula.

"Jika sudah ada surat balasan dari KI pusat, kami pastikan tindak lanjut dan serahkan nama-nama komisioner ke gubernur. Tidak perlu waktu lama. Dalam hitungan jam setelah surat diterima akan kami tetapkan dan serahkan ke gubernur," tegas Ketua DPRD Sumbar Supardi saat audiensi bersama Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi (PJKIP) Sumbar, Senin (8/1), di gedung DPRD setempat.

Ia menjelaskan, surat tersebut yakni balasan dari surat yang dikirimkan DPRD perihal permintaan pemaparan secara tertulis tentang tafsir pasal-pasal yang mengatur tentang seleksi komisioner. Terutama terkait tes kepatutan dan ke layakan serta penetapan berdasarkan hasil tes yang dilaksanakan oleh DPRD.

"Sebenarnya tafsiran pasal ini sudah dipaparkan KI pusat saat Komisi I dan Wakil Ketua DPRD Irsyad Safar berkonsultasi ke sana Oktober lalu. Namun kami tindak lanjut lagi dengan meminta pemaparan secara tertulis untuk pegangan jika nanti ada permasalahan atau sengketa," ujar Supardi.

Seperti diketahui, baru-baru ini gubernur tidak memperpanjang masa jabatan komisioner KI yang lama. Di lain sisi, komisioner yang baru belum ditetapkan. Hal ini mengakibatkan kekosongan komisioner di KI Sumbar.

Supardi menjelaskan, DPRD telah menyelesaikan tugas seleksi sesuai aturan. Kronologisnya, lanjut Supardi, gubernur menyerahkan 15 nama calon komisioner pada Desember 2022. Lalu Komisi I DPRD melaksanakan tes uji kepatutan dan kelayakan pada Januari.

"Tes sudah dilaksanakan dan komisi I telah menyerahkan hasilnya pada kami sebagai pimpinan. Ada lima nama calon komisioner," katanya.

Namun kemudian ketika pimpinan DPRD meminta nilai dan perangkan berdasarkan hasil tes, komisi I tidak bisa menyerahkannya.

"Akhirnya diputuskan untuk mengkonsultasikan permasalahan ini ke KI pusat, yakni mempertanyakan tafsiran pasal yang mengatur seleksi tersebut. Terutama terkait nilai

dan perangkan. Kami menilai ini perlu sebagai pegangan DPRD," katanya.

Supardi mengatakan, DPRD menilai sudah sangat tepat jika tafsiran pasal ditanyakan DPRD pada KI pusat. Jika dipertanyakan ke Kemenkumham tetap saja akan disarankan untuk berkonsultasi ke KI.

Di lain sisi, Supardi menegaskan seleksi yang dilakukan DPRD dipastikan bebas intervensi. "KI ini bukan lembaga politik dan tidak boleh dipolitisasi," ujarnya.

Ia mengatakan, DPRD sangat mendukung keberadaan KI. Keterbukaan informasi bahkan selalu menjadi salah satu hal yang selalu digaungkan DPRD. Bahkan juga selalu dilakukan sekretariat DPRD melalui banyak inovasi.

Dana untuk KI pun selalu menjadi salah satu yang selalu diperjuangkan DPRD dalam rapat penyusunan anggaran bersama pemerintah daerah.

Supardi menilai, KI Sumbar bukan dibekukan atau dibubarkan seperti yang anggapan yang beredar di tengah masyarakat. "Lembaga tetap ada dan nanti setelah komisioner ditetapkan, KI akan berjalan seperti biasa," katanya.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar yang juga hadir dalam hearing tersebut mengatakan, DPRD tentu berharap komisioner KI cepat ditetapkan. Itulah mengapa persoalan soal penafsiran pasal

yang mengatur seleksi dikonsultasikan ke KI pusat. "Nanti setelah surat ada akan segera ditindak lanjut. Ini sekarang kan sudah jelas," ujar Irsyad.

Ketua PJKIP Sumbar, Al-mudazir dalam pertemuan tersebut, menyekali SK yang dikeluarkan gubernur untuk KI.

"Meskipun tidak ada bahasa 'membekukan', namun dengan SK tersebut berarti tidak ada keberadaan para komisioner di KI Sumbar saat ini, dan sangat tidak mungkin sebuah Komisi Informasi ada tanpa komisioner di dalamnya," ujarnya.

Ia menilai, seharusnya gubernur memperpanjang masa jabatan komisioner lama jika belum ada penetapan komisioner baru.

"Di provinsi lain bahkan ada perpanjangan itu sampai dua tahun. Ini tidak ada aturan yang melarang perpanjangan masa jabatan komisioner," ujarnya.

Sementara, anggota PJKIP Sumbar, yang juga mantan Komisioner KI Sumbar dua periode, Adrian Tuswandi, mengatakan bahwa dirinya menginterpretasi SK ini mem-bubarkan KI Sumbar.

Dia juga menyayangkan, 'bola panas' seolah dilempar ke Ketua DPRD Sumbar. Alasan tidak ada hasil finalisasi seleksi anggota komisioner KI Sumbar di DPRD, tidak bisa dijadikan alasan bagi Pemprov untuk menyetop perpanjangan masa jabatan anggota KI Sumbar. (401)

Komisi I DPR Bersyukur Prabowo tak Bongkar Data Pertahanan Saat Debat

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid menyatakan rasa hormatnya pada capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang tidak terpancing untuk membuka data pertahanan Indonesia saat dicecar oleh capres lain dalam debat tadi malam (7/1/2024). Prabowo merupakan Menteri Pertahanan aktif yang mitra kerjanya di DPR adalah Komisi I.

"Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita. Menurut saya ini bentuk kejarawanan, mementingkan negara di atas politik, meski sudah dicecar sebegitu rupa" kata Meutya lewat keterangan tertulisnya, Senin (8/1/2024).

Meutya menjelaskan, data pertahanan tidak dibuka secara sembarangan. Sebab, data pertahanan masuk kategori rahasia dan hanya bisa diketahui oleh kalangan tertentu.

Menurut dia, para capres yang meminta Prabowo untuk membuka data pertahanan Indonesia saat debat berarti tidak memahami risiko mengumbar data pertahanan di depan publik. "Apalagi debat diperhatikan oleh seluruh dunia. Jika dibicarakan di publik sama saja membuka rahasia pertahanan kita ke negara lain," ujarnya, seperti diwartakan Republika.co.id.

Lebih lanjut, politikus Partai Golkar itu menyebut, pembahasan pertahanan seharusnya menjadi topik yang mempersatukan para capres. Pasalnya, isu pertahanan, apalagi data pertahanan, sangat berkaitan dengan kedaulatan negara Indonesia.

"Memanfaatkan data pertahanan yang sifatnya rahasia untuk menyudutkan lawan politik mestinya tidak terjadi. Negara lain sangat berkepentingan terhadap isu pertahanan ini," ujarnya.

Meutya kemudian mengimbau rakyat untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin kedepan, karena kedaulatan negara dipertaruhkan. Apalagi, kondisi geopolitik dunia saat ini sedang rentan dan bisa berdampak terhadap Indonesia. "Untuk itu kita butuh pemimpin kuat yang bisa menjamin kedaulatan negara untuk membawa kita menghadapi tantangan dunia. Seorang pemimpin negarawan yang memikirkan negara diatas kepentingan lain, apalagi ambisi politik pribadinya," katanya.

Dalam debat capres yang berlangsung sengit di Istana Senayan, Jakarta tadi malam, Prabowo Subianto berkalikali menyebut data pertahanan yang disampaikan capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo salah. Prabowo mengajak dua kompetitornya itu untuk bertemu agar bisa menjelaskan data pertahanan yang sesungguhnya.

Prabowo enggan membeberkan data pertahanan saat debat. Namun, Anies dan Ganjar bersikeras agar Prabowo mengungkap data yang benar saat debat berlangsung. Hingga debat usai, Prabowo tetap tak membuka data pertahanan RI. (*)

Tekan Biaya Haji, Tingkatkan Diplomasi RI ke Saudi

JAKARTA - Pengamat Ekonomi Syariah, Yusuf Wibisono mengatakan, pemerintah Indonesia harus meningkatkan diplomasi dan negosiasi ke Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Hal ini guna menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau (BPH) terus meningkat setiap tahunnya dan diikuti dengan kenaikan ongkos haji yang mesti dibayarkan jamaah atau Biph.

Untuk musim haji tahun depan, Pemerintah telah menetapkan BPH sebesar Rp93,4 juta atau naik sebesar 3,35 juta dari tahun 2023 sebesar Rp90,05 juta dengan BPH sebesar Rp56 juta atau 60 persen dari BPH.

"Dalam jangka pendek, pemerintah harus meningkatkan diplomasi dan negosiasinya ke pemerintah Arab Saudi agar membantu jamaah dari biaya yang terlalu mahal, dimana kini BPH di kisaran Rp 95 juta per jamaah," ujar Yusuf, seperti diwartakan Republika.co.id, Senin (8/1/2024).

Yusuf mengatakan, diplomasi yang masih bisa dilakukan Pemerintah Indonesia ke Saudi adalah terkait biaya masyair, biaya visa, biaya akomodasi hingga biaya penerbangan jamaah. Ia menekankan ibadah haji dan umroh adalah aktivitas ritual rutin, sehingga menjadi strategis untuk menekan biaya dari komponen utama haji dan umroh yang banyak membebani jamaah Indonesia. "Sebagai misal, adopsi kontrak akomodasi jangka panjang akan menciptakan kepastian harga sejak awal dan harga bisa lebih murah," ujarnya.

Terlebih kata Yusuf, dengan jumlah jamaah Indonesia yg sangat besar mencapai 220 ribu orang diyakini menjadi daya tawar Indonesia kepada Arab Saudi.

"Keputusan jamaah Indonesia akan menentukan harga pasar disana. Jamaah kita butuh naik haji ke Arab Saudi, namun Arab Saudi juga butuh kehadiran jamaah haji kita yang memberi pendapatan tinggi bagi mereka," ujarnya.

Yusuf pun mencermati pasca pandemi, biaya ibadah haji terus meningkat, dengan rata-rata 16,7 persen setiap tahun. Pada 2022, atau tahun pertama haji pascapandemi setelah haji ditiadakan pada 2020 dan 2021 karena Covid-19, biaya BPH yang ditanggung jamaah mencapai Rp 39,9 juta, meningkat 13,2 persen dibandingkan 2019 yang hanya Rp 35,2 juta. (*)

PENGUMUMAN STUDI AMDAL

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamandatkan bahwa bagi setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan atau berpeluang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup diantaranya menerangkan, bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang berada di dalam dan atau berbatasan dengan kawasan lindung wajib memiliki AMDAL.

Rencana usaha/kegiatan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) oleh PT. Kencana Sawita Sentana (kapasitas olah 60 ton TBS kelapa sawit per-jam) berada di wilayah Kampung Sungai Lasi Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. Lokasi rencana kegiatan pada lahan seluas 40,40 ha diantaranya berada di sempadan sungai (sempadan sungai merupakan kawasan lindung) sehingga termasuk rencana kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Adapun dampak potensial dari rencana kegiatan diantaranya sebagai berikut.

1. Munculnya persepsi masyarakat.
2. Keresahan masyarakat.
3. Peluang kerja.
4. Penurunan kualitas udara dan kebisingan.
5. Timbulan bau.
6. Penurunan kualitas air permukaan.
7. Gangguan habitat biota akuatis.
8. Gangguan lalu lintas.

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2021 menyatakan bahwa penyusunan AMDAL diantaranya dilakukan melalui pelibatan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Pasal 28 ayat (2) pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dilakukan melalui : a) pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan b) konsultasi publik. Pelibatan masyarakat ditujukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap segala sesuatu terkait dengan dampak rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan. Untuk itu, dalam penyusunan AMDAL terhadap rencana PKS oleh PT. Kencana Sawita Sentana diadakan **PENGUMUMAN AMDAL**.

Sehubungan dengan **PENGUMUMAN STUDI AMDAL**, bersama ini kami menghimbau masyarakat di sekitar lokasi rencana kegiatan untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait dengan dampak lingkungan yang akan terjadi akibat pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana di atas. Saran, pendapat dan tanggapan kiranya dapat disampaikan dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak pengumuman ini, kepada :

1. PT. Kencana Sawita Sentana - Alamat Komplek Sentra Lalumenten Bick D No. 3 Jakarta Barat 11460.
2. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
2. Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab Pesisir Selatan.
3. Kantor Camat Lunang.
4. Kantor Wali Nagari Sindang Lunang dan Lunang Selatan.
5. PT. Gama Multi Usaha Mandiri (Konsultan Penyusun AMDAL) Bulaksumur H-5, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta Telp. (0274) 549426-552433.
6. Kantor Perwakilan PT. GAMA Multi Usaha Mandiri Jalan Gunung Semeru III No. 5 Gunung Panglun Padang (Kontak Person 085263 072440).

Demikian **PENGUMUMAN STUDI AMDAL** ini disampaikan dengan harapan dapat menjadi perhatian kita bersama.

Sindang Lunang, 09 Januari 2024

PT. KENCANA SAWITA SENTANA

PT. GAMA MULTI USAHA MANDIRI

dto
Direktur

dto
Direktur Utama

Yamaha Indonesia, Luncurkan XMAX Varian Tech MAX

SINGGALANG - PADANG

Kabar gembira hadir bagi para pecinta skutik premium di tanah air. Pasalnya pada penghujung tahun 2023, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. (YIMM) meluncurkan varian terbaru di jajaran skutik premiumnya, yaitu XMAX Tech MAX yang berlangsung pada Hari Sabtu di The Upper Cliff Sentul, Kabupaten Bogor.

Kehadiran XMAX Tech MAX pun diyakini akan mendapatkan sambutan yang positif dari Masyarakat Indonesia. Hal tersebut berkaca dari kesuksesan peluncuran XMAX Connected di ajang IMOS tahun lalu, yang mampu menyedot banyak atensi publik dan sangat begitu diminati hingga saat ini.

Dilengkapi dengan komponen-komponen dan warna yang spesial, XMAX Tech MAX dirancang secara khusus untuk menghadirkan nilai-nilai premium yang lebih kuat melalui tampilan gaya

cockpit, sentuhan artistik dan mewah tersebut terletak pada komponen Jok dan juga Cover Lid Pocket yang menggunakan material sejenis kulit dengan pola jahitan beraksen emas.

Selain itu, komponen lain yang membuat varian ini berbeda dengan varian XMAX Connected adalah pada bagian handgrip yang memiliki embos logo Tech MAX, pijakan kaki yang menggunakan plat aluminium, serta spesial emblem Tech MAX yang melekat pada kedua sisi body motor. Sementara dari sisi warna, varian anyar ini juga mengusung konsep special color, yaitu Magma Black yang secara visual terlihat unik, mewah dan maskulin.

Seperti halnya XMAX Connected, varian XMAX Tech MAX juga dilengkapi dengan berbagai fitur unggulan terbaik dikelas skutik premium 250cc. Seperti Sistem Navigasi, TFT Infotainment System, Y-Connect, Sistem pengereman ABS hingga Traction Control.

Varian XMAX Tech MAX sendiri dipasarkan seharga Rp 71.910.000 On The Road (OTR) konsumen atau penggunaannya, merasakan kualitas produk sepeda motor Yamaha XMAX Connected.

Varian Tech MAX silahkan mengunjungi website resmi Yamaha Tjahaja Baru www.tjahaja-beberapa bagian sepeda motor. Pada bagian baru.com/atau Instagram @tjahaja.baru. (rel)





TERIMA - Wawako Ekos Albar terima penghargaan dari Gubernur Sumbar Mahyeldi didampingi Ketua Ombudsman perwakilan Sumbar Yefri Heriani. (prokopim)

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 2023

Pemko Padang Raih Nilai Kualitas Tinggi Predikat Kepatuhan

PADANG - SINGGALANG

Mengawali tahun 2024, Pemerintah Kota Padang kembali menerima penghargaan. Kali ini Pemko Padang meraih nilai kualitas tinggi (82,64) dalam Penilaian Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik atau Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023 dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Piagam penghargaan bergengsi itu diterima Wakil Wali Kota (Wawako) Padang Ekos Albar dari Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yefri Heriani di Auditorium Gubernur Sumbar, Senin (8/1). Ekos Albar menyampaikan,

atas nama Pemerintah Kota Padang mengucapkan terimakasih kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumbar yang telah memberikan penghargaan terkait pelayanan publik bagi Pemko Padang.

Prestasi ini menurut Ekos, adalah kerja keras dan komitmen yang kuat dari semua OPD terkait di lingkup Pemko Padang, khususnya dalam hal kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat.

"Prestasi ini juga berkat kolaborasi dan dukungan semua unsur di Kota Padang. Kita akan terus melakukan perbaikan dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Sehingga ke depan predikat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang saat ini meraih nilai kualitas tinggi, bisa naik menjadi kualitas tertinggi," harapnya.

Sementara itu, Kepala Om-

budsman RI Perwakilan Sumbar Yefri Heriani menjelaskan maksud dari penilaian predikat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik bagi pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sumbar tersebut.

"Di antaranya adalah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan dan meng evaluasi kualitas pelayanan publik yang mencakup pemenuhan standar pelayanan, maklumat layanan serta sistem informasi pelayanan publik, sarana-prasarana dan fasilitas. Selain itu juga berkaitan dengan pelayanan khusus, pengelola pengaduan, penilaian kinerja, visi-misi serta motto pelayanan, atribut, kompetensi pelaksana dan pelayanan terpadu.

Adapun tujuan umum penilaian adalah sebagai upaya perbaikan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, serta pencegahan terha-

dap maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan sesuai dari maksud penilaian.

"Untuk penilaian kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman ini dilaksanakan pada 25 kementerian, 15 lembaga dan 548 pemerintah daerah. Kategori penilaian terbagi dari kualitas tertinggi, tinggi, hingga kualitas sedang, rendah dan terendah. Harapannya tentu bagaimana pemerintah daerah, kementerian atau lembaga di Indonesia senantiasa melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publiknya," harapnya.

Dalam kegiatan Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023 dari Ombudsman RI Perwakilan Sumbar tersebut, juga hadir para Bupati/Walikota yang menerima piagam penghargaan sesuai kategori penilaian. (103)

DIANTAR OLEH DIREKSI

Perumda AM Padang Umrahkan Dua Pelanggan

Padang, Singgalang

Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang bersama Bank Nagari serahkan langsung hadiah utama Umrah Gebyar Pelanggan 2023 pada pemenang, Senin (8/1).

Hadiah itu diberikan bagi pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang memenangkan Umrah Gebyar Pelanggan. Pemberian hadiah diperoleh melalui pengundian.

"Ini bentuk apresiasi kita pada pelanggan yang membayar rekening tepat waktu, yakni sebelum tanggal 5 setiap bulannya," sebut Direktur Utama Perumda AM Kota Padang, Hendra Pebrizal.

Hadir pada kesempatan itu, Direktur Umum Perumda AM, Afrizal Kuning. Selain itu juga jajaran manager Perumda AM.



SERAHKAN - Dirut Perumda AM Kota Padang, Hendra Pebrizal didampingi Dirut Afrizal Kuning dan perwakilan Bank Nagari serahkan hadiah umrah pada pelanggan Perumda AM Kota Padang, Senin (8/1). (ist)

Seperti manager area pelayanan Utara Susi Payan dan manager area pelayanan pusat, M. Syukri. Selain itu juga hadir perwakilan dari Bank Nagari.

Hadiah Utama berupa umrah ke Tanah Suci untuk dua

pelanggan beruntung persembahan dari Bank Nagari. Pelanggan yang beruntung mendapatkan hadiah yakni, Ernawati di Gunung Panglun. Kemudian Srumulidar di Komplek Singgalang, Tabing.

"Penyerahan ini bentuk komitmen kita bagi pelanggan untuk memberikan hadiah jika pembayaran rekening tepat waktu," tegas dia.

Disebutkannya, hadiah tersebut juga dukungan dari Bank Nagari yang ikut berkontribusi pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49 Perumda AM Kota Padang. "Insya Allah reward ini akan terus ditingkatkan sebagai apresiasi terhadap pelanggan yang telah membayar tagihan air tepat waktu," kata dia.

Sebelumnya, pengundian dilakukan pada puncak perayaan HUT Perumda AM Kota Padang Sabtu, 30 Desember 2023. Undian dicabut di hadapan Walikota Padang Hendri Septa dan Forkopimda. Kemudian terpilih dua nama untuk penerima hadiah utama, yakni berangkat umrah. (104)

DAPAT BANTUAN KAMBING

Afrizal Anggota DPRD Sumbar Peduli Kelompok TCB

Padang, Singgalang

Jalizar, Ketua Kelompok Ternak Cahaya Baru (TCB) bahagia. Soalnya impian dirinya beserta anggota kelompok ternak yang berbasis di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji itu untuk mendapatkan kambing akhirnya terkabul.

Ini setelah Anggota DPRD Sumbar Afrizal memperjuangkannya di DPRD Sumbar. Afrizal yang berkarakter peduli dan merakyat ini, merespon aspirasi rakyat. Alhasil, sebanyak 50 kambing, 40 diantaranya betina dihibahkan kepada kelompok ternak tersebut.

"Hampir habis akal kami, kemana hendak mengadu. Apa usaha yang kami lakoni lagi. Pandemi Covid-19 membawa petaka. Tapi ini ujian dari Allah SWT kepada umatnya. Kami terus berdoa dan berusaha," kata Jalizar, ketua kelompok ternak Cahaya Baru.

Dia menuturkan, pandemi Covid-19 yang terjadi tahun 2020 dan 2021 berdampak kepada perekonomian masyarakat. Anggota kelompok ternak Cahaya Baru juga terdamp-



BERSAMA - Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Golkar Afrizal bersama Ketua Kelompok Ternak Cahaya Baru, Jalizar. (ist)

pak. Tapi tidak membuat mereka patah semangat. Sebab mereka yakin, itu semua diatur oleh Sang Khalik.

Dan di saat ada reses Anggota DPRD Sumbar Afrizal ke Korong Gadang, beberapa perwakilan kelompok ternak Cahaya Baru hadir. Jalizar hadir. Dia menyampaikan aspirasi anggota kelompoknya itu pada 2022 tersebut. Siapa sangka Anggota DPRD Sumbar Afrizal bisa hadir ke sana sehingga mereka bisa sampaikan aspirasi. "Sekali lagi,

semua Allah SWT yang mengatur," sebut Jalizar.

Afrizal saat reses itu mendengar aspirasi dan 'permintaan' warga. Ditampungnya untuk kemudian diperjuangkan di DPRD Sumbar. Sebelum diperjuangkan, Afrizal juga meninjau lokasi. Politisi Golkar yang sudah manggung di DPRD Sumbar sejak 2014 mengajak pula anggota DPRD Padang Zulhadi Z. Latif.

Memang begitu tipe Afrizal. Semua aspirasi dan harapan masyarakat diterima baik-baik

dan diupayakan diperjuangkan di DPRD Sumbar. Dia sadar, bisa hadir di DPRD Sumbar karena dipilih rakyat. Maka Afrizal selalu gigih berjuang untuk kepentingan rakyat.

Pas dicek di lapangan dan didalam dialog dengan masyarakat bahkan juga mengajak perwakilan ASN Pemprov, didapatkan kesimpulan, yang sangat prioritas dihidulatkan. Dan harapan kelompok ternak Cahaya Baru adalah sangat prioritas.

Alhasil diangankan pada APBD Sumbar 2023 dan sudah diterima kelompok ternak Cahaya Baru pada akhir 2023.

"Terimakasih Pak Afrizal. Kami berdoa, Pak Afrizal kembali menjadi wakil rakyat. Wakil rakyat model Pak Afrizal lah yang sebetulnya harus dipilih. Peduli, gigih dan tanggap," sebutnya.

Jawab Afrizal? "Semoga usaha kelompok ternak Cahaya Baru berkembang dan akhirnya dapat meningkatkan taraf perekonomian anggota. Peliharaan dan rawatlah baik-baik. Jangan lupa kasih makan. Insyaallah berkembang," imbuh Afrizal. (015)

SE-INDONESIA

Tingkat Gemar Membaca Warga Padang Peringkat 8

PADANG - Kegemaran membaca warga Kota Padang terus meningkat dari waktu ke waktu. Terbukti di sepanjang 2023 lalu, kegemaran membaca warga setempat meningkat pesat. Bahkan mencatatkan nilai tertinggi di Sumatera Barat dan nasional.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Padang Feri Mulyani Hamid membenarkan hal tersebut. Menurutnya, Padang mencatatkan nilai tertinggi dan melonjak di daftar kabupaten/kota di Indonesia.

"Berdasarkan data yang diterbitkan Perpustakaan RI, Tingkat Gemar Membaca (TGM) Kota Padang berada di peringkat kedelapan se-Indonesia, peringkat ini naik dibanding tahun sebelumnya (2022)," jelasnya belum lama ini.

Diakuinya, nilai TGM Kota Padang di level nasional saat ini yakni 72,34. Padang berada di atas Kota Jambi dan Jakarta Pusat. Bahkan Padang saat ini berada di atas nilai TGM rata-rata nasional yang hanya 66,77.

"Untuk nilai rata-rata nasional, Kota Padang jauh di atas nilai rata-rata itu. Sementara di tingkat Sumatera Barat, nilai TGM Kota Padang tidak terkalahkan oleh kabupaten/kota lainnya di Sumbar. Padang berada di peringkat pertama," ungkap Kadisperpusip itu.

Feri Mulyani Hamid menyebut, dengan melejitnya angka TGM Kota Padang, ikut menyumbang naiknya angka TGM Provinsi Sumbar di level nasional. Sumbar terdongkrak ke peringkat delapan nasional dengan nilai 68,46.

"Naiknya TGM Kota Padang membuat nilai TGM Provinsi Sumbar ikut melejit di tahun 2023," katanya.

Diakui Kadisperpusip, naiknya TGM Kota Padang berkat upaya pustakawan yang ada di perpustakaan di Padang. Termasuk peran serta masyarakat dalam mengajak warga lain untuk gemar membaca.

"Perlahan tapi pasti kita terus berupaya meningkatkan nilai TGM melalui kegiatan yang dilakukan, seperti story telling ke sekolah-sekolah dan di setiap kegiatan 'Car Free Day', kegiatan read aloud, bedah buku, dan lainnya," kata dia. (406)

Warga Sampaikan Aspirasi kepada Caleg PPP Wahyu IP

PADANG - Dalam rangka mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, Caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Dapil Padang 6, Wahyu Iramana Putra, menggelar silaturahmi yang menghadirkan keluhan perwakilan warga. Di tengah kehangatan pertemuan yang berlangsung di wilayah tersebut, berbagai aspirasi dan harapan warga pun terungkap.

Dalam sesi dialog yang penuh antusiasme, warga turut menyampaikan aspirasi mereka terkait kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan sekitar. Wahyu Iramana Putra, selaku Caleg PPP, dengan seksama mendengarkan dan berkomitmen untuk memperjuangkan berbagai program yang menjadi tuntutan masyarakat.

Beberapa poin program yang disampaikan oleh Wahyu Iramana Putra sebagai tanggapan atas aspirasi yang terungkap antara lain, kesejahteraan masyarakat; Wahyu berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Mendorong masyarakat tetap sekolah, melalui inisiatif pendidikan, Wahyu akan mendorong agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Selanjutnya menyiapkan Bank Sampah. Program bank sampah akan diinisiasi guna mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan praktik pengelolaan sampah yang lebih baik.

Penerangan Jalan dengan Lampu Asmaulhusnah. Wahyu berencana memperbaiki penerangan jalan dengan memasang lampu yang tidak hanya berfungsi sebagai penerangan, tetapi juga memberikan nilai edukasi dengan menyematkan Asmaulhusnah sebagai desainnya.

Memperhatikan UMKM dan fasilitas jualan. Perhatian khusus akan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk penyediaan fasilitas yang mendukung keberlangsungan usaha.

Bantuan Persyaratan UMKM yang akan dikelola melalui tokoh masyarakat Jalan Karet Maktok. "Kita akan berupaya memberikan bantuan dalam melengkapi persyaratan administratif UMKM, dengan dukungan dari pihak terkait," kata Wahyu.

Kemudian pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dalam hal ini Wahyu akan menceritakan bahwa dia telah menginisiasi pembentukan Kelompok Usaha Bersama untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat secara kolektif.

"Hal ini sudah pernah kita lakukan seperti pembentukan KUBE usaha bunga di Jati. Ini nantinya juga akan kita upayakan di Karet ini," lanjutnya.

Lalu mewujudkan Karet Madani serta Pembangunan TPA. "Kita akan berkomitmen untuk mewujudkan Karet Madani dan pembangunan Tempat Pendidikan Alquran (TPA) di wilayah ini," katanya.

Memenuhi kebutuhan sembako bagi masyarakat tidak mampu. Wahyu berjanji untuk memastikan kebutuhan dasar seperti sembako akan terpenuhi, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu.

Wahyu Iramana Putra menyatakan semua program yang diusungnya merupakan hasil dari dialog intensif dengan masyarakat setempat. Ia berkomitmen untuk menjadi wakil yang mengabdikan dan merealisasikan aspirasi serta kebutuhan nyata yang diungkapkan oleh warga.

Dalam kesempatan itu, masyarakat memberikan apresiasi atas kesediaan Wahyu Iramana Putra untuk mendengarkan dan merespons aspirasi mereka, serta berharap program-program tersebut dapat segera diwujudkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Jalan Karet Padang. (105)



SILATURAHMI - Wahyu Iramana Putra saat bersilaturahmi dengan warga Jalan Karet, Padang, guna mendengarkan aspirasi warga, Minggu (7/1). (bambang)